

Batola dan Kapuas Sepakat Bangun Jembatan Penghubung



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/21/jembatan-penghubung-kabupaten-batola-kalsel-kapuas-kalteng-akan-dibangun-masyarakat-antusias>

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan, dan Pemkab Kapuas, Kalimantan Tengah, membuat kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Desa Pantang Raya (Batola) dan Muara Dadahup (Kapuas) atau yang disingkat Jembatan Panda.

Wacana bangun jembatan penghubung antara Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, muncul setelah pertemuan para pejabat.

Kesepakatan langsung dilakukan kedua kepala daerah, yaitu Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, di Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Kesepakatan, yang berlangsung tepat di hari ulang tahun Bupati Batola Hj Noormiliyani AS tersebut, juga hadir SKPD terkait, seperti Bappelitbang, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan kedua belah pihak.

Terdapat beberapa item dalam kesepakatan yang dilakukan, di antaranya jembatan yang menghubungkan kedua kabupaten bertetangga ini akan dilaksanakan antara Desa Pantang Raya, Kecamatan Tabukan, Batola, dan Desa Muara Dadahup ,Kecamatan Kapuas Murung, Kapuas.

Sambil menunggu realiasi pembangunan jembatan, maka akan dibangun dermaga penyeberangan permanen di Muara Dadahup dan Pantang Baru.

“Melalui kesepakatan ini kami berharap arus lalu lintas orang dan barang antara dua provinsi akan semakin cepat dan lancar,” tutur Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.

Ben Brahim menilai, pembangunan sarana penghubung di kedua kabupaten tetangga ini sangat penting. Terlebih bagi Kapuas yang mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk dibangun food estate.

Sebenarnya, terang mantan Kadis PU Provinsi Kalteng itu, di Kalteng terdapat dua kabupaten yang menjadi sasaran dalam pembangunan food estate, yaitu di Kapuas sekitar 73 persen dan 23 persen sisanya di Kabupaten Pulang Pisau dengan luas kawasan mencapai sekitar 16.237 hektare.

“Kita berharap dengan terbukanya arus transportasi ini hubungan kedua kabupaten ini akan semakin intens agar bisa menjadi kabupaten maju, hebat, dan menjadi tolak ukur bagi kabupaten/kota lainnya,” harap pria yang menjabat Bupati Kapuas dua periode tersebut.

Sementara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama, kedua kabupaten hendaknya terus bersinergi dan berkolaborasi sampai pembangunan jembatan terealisasi.

“Saya berharap kerjasama ini juga diikuti yang lain-lainnya sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah akan meningkat seiring terjadinya peningkatan usaha dan perekonomian mereka,” papar mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini.

Kedua daerah juga bersepakat akan menyusun perencanaan lebih lanjut, sebelum dilakukan MoU antara Bupati Batola Hj Noormiliyani dan Bupati Kapuas Ben Brahim. Pembangunan diupayakan masuk RPJMN, sehingga dibiayai APBN.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/21/jembatan-penghubung-kabupaten-batola-kalsel-kapuas-kalteng-akan-dibangun-masyarakat-antusias>, 21 Maret 2022.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/324261/batola-dan-kapuas-sepakat-bangun-jembatan-penghubung>, 23 April 2022.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.

- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan

setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.

- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan kluster-kluster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi kluster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Struktur APBD



1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum

**LAIN – LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH**

1. Hibah tidak mengikat
2. Dana darurat dari pemerintah
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kab/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya